

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 Pengertian Akuntansi**

Akuntansi adalah sistem informasi keuangan yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi pihak yang berkepentingan.

Menurut Kieso, et al. (2010) mendefinisikan akuntansi adalah :

“Suatu sistem dengan input data/informasi dan output berupa informasi dan laporan keuangan yang bermanfaat bagi pengguna internal maupun eksternal entitas”.

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2011:3)

Akuntansi adalah bahasa atau alat komunikasi bisnis yang dapat memberikan informasi tentang kondisi keuangan (ekonomi) berupa posisi keuangan terutama dalam jumlah kekayaan, utang, dan modal suatu bisnis dan hasil usahanya pada waktu (periode tertentu).

Menurut Azhar Susanto (2013:4) akuntansi adalah bahasa bisnis, setiap organisasi menggunakannya sebagai bahasa komunikasi saat berbisnis”. Menurut Marshall B.Romney (2014:11), Akuntansi adalah proses indentifikasi, pengumpulan, dan penyimpanan data serta proses pengembangan, pengukuran, dan komunikasi”.

Berdasarkan pengertian tersebut mengenai akuntansi, penulis mengambil kesimpulan bahwa akuntansi adalah suatu proses pencatatan

yang dimulai dari transaksi jurnal hingga membentuk suatu laporan keuangan yang akan digunakan kepada pihak yang membutuhkannya dalam mengambil keputusan.

#### **2.1.1.1 Tujuan Akuntansi**

Fungsi utama Akuntansi sebagai informasi keuangan untuk lembaga ekonomi dan pemegang keputusan. Adapun tujuan akuntansi adalah sebagai berikut:

Menurut Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) :

1. Tujuan umum
  - a. Memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai sumber ekonomi dan kewajiban serta modal suatu perusahaan.
  - b. Memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan dalam sumber-sumber ekonomi neto suatu perusahaan yang timbul dari aktivitas-aktivitas usaha dalam rangka memperoleh laba.
  - c. Memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan di dalam mengestimasi potensi perusahaan dalam menghasilkan laba.
  - d. Memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan dalam sumber-sumber ekonomi dan kewajiban.

- e. Untuk mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan keuangan.

## 2. Tujuan kualitatif

Relevan, Dapat Dimengerti, Daya Uji, Netral, Tepat Waktu, Daya Banding, Lengkap.

### **2.1.1.2 Siklus Akuntansi**

Siklus akuntansi adalah tahap-tahap proses akuntansi dalam sistem informasi akuntansi yang diperlukan untuk mengumpulkan dan mengolah data terkait transaksi akuntansi. Dikatakan sebagai siklus, karena tahap-tahap proses akuntansi dilaksanakan berulang kali selama perusahaan beroperasi.

Tahap-tahap proses akuntansi yang membentuk siklus akuntansi meliputi:

1. Mencatat transaksi akuntansi yang terjadi selama satu periode akuntansi ke dalam jurnal transaksi.
2. Memindahbukukan (posting) transaksi akuntansi dari jurnal ke buku besar.
3. Menyusun neraca saldo untuk mengecek kesamaan debit dan kredit transaksi akuntansi yang telah dicatat dan dibukukan.
4. Membuat jurnal penyesuaian dan membukukan (posting) jurnal penyesuaian itu ke buku besar.

5. Menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo disesuaikan ini menjadi sumber data dasar untuk menyusun laporan keuangan.
6. Menyusun laporan keuangan berdasarkan neraca saldo setelah penyesuaian.
7. Membuat jurnal penutup dan membukukan (posting) jurnal penutup itu ke buku besar.
8. Menyusun neraca saldo setelah penutupan (tahap opsional).
9. Membuat jurnal pembalik dan membukukan (posting) jurnal pembalik itu ke buku besar (tahap opsional).

Meskipun siklus akuntansi yang digambarkan di atas mengacu pada proses akuntansi dalam sistem akuntansi manual, siklus akuntansi pada dasarnya sama, terlepas dari apakah perusahaan menggunakan sistem akuntansi manual atau sistem informasi akuntansi berbasis komputer. Perusahaan melaksanakan tahap-tahap siklus akuntansi pada setiap periode akuntansi. Siklus akuntansi juga pada dasarnya sama, baik untuk perusahaan jasa, perusahaan dagang, maupun perusahaan manufaktur dan instansi pemerintahan.

## 2.1.2 Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Menurut Bastian (2006) dalam Jurnal Penelitian dari Rusita Untari mengatakan bahwa akuntansi sektor publik adalah

mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat dilembaga lembaga tinggi Negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta. Menurut PP No.71 Tahun 2010 butir 61 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan akuntansi adalah proses, identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengiktisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya

Berdasarkan pengertian di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa akuntansi sektor publik adalah suatu akuntansi yang diterapkan dalam instansi *non-profit* atau tidak memprioritaskan suatu keuntungan, dan instansi tersebut diharappkan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat umum guna menyejahterakan kehidupan bangsa berdasarkan panduan SAP.

### 2.1.2.1 Konsep Laporan Keuangan Sektor Publik

Dalam suatu laporan keuangan, memiliki karakteristik perbedaan tersendiri. Begitu pun dengan laporan keuangan sektor publik milik pemerintah. Menurut PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, terdapat beberapa jenis laporan keuangan pemerintah antara lain :

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- b. Laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)
- c. Neraca
- d. Laporan Operasional (LO)
- e. Laporan Arus Kas (LAK)
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

### 2.1.3 Pengertian Efisiensi

Pengertian Rasio Efisiensi dikutip dari buku Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak bersifat absolut, tetapi relatif. Artinya tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk rasio ini. (Mahmudi, 164)

Adapun pengertian lain dari Efisiensi diungkapkan dalam jurnal akuntansi berjudul Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandung sebagai berikut:

Pengertian Efisiensi berhubungan dengan konsep produktifitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara *output* yang dihasilkan terhadap *input* yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu

dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*). (Melania Rampengan dkk)

Sehingga dari uraian penjelasan diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa efisiensi adalah suatu hal yang dapat dipergunakan semaksimal mungkin dalam kegiatan dengan dana yang sekecil-kecilnya, dan dalam menghitung suatu efisiensi Belanja Negara dalam pemerintahan dapat menggunakan Rasio Efisiensi Belanja. Rasio ini merupakan perbandingan antara jumlah realisasi belanja langsung yang terpakai dalam satu tahun anggaran dibagi dengan jumlah penerimaan pada satu tahun anggaran yang sama, kemudian dikali dengan presentase senilai 100. Rumus Rasio Efisiensi Belanja dapat diuraikan berdasarkan kutipan Mahmudi sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Penerimaan}} \times 100 \%$$

Hasil dari perhitungan Rasio Efisiensi, dapat diketahui sejauh mana satuan kerja dapat menyerap alokasi dana yang diberikan pemerintah padanya menggunakan tabel khusus. Tabel Efisiensi memiliki beberapa tingkat kategori untuk mengetahui daya serap dana secara baik atau tidak. Pada tingkatan pertama adalah cakupan 100% ke atas yang dianggap “Tidak Efisien” pada suatu satker. Tingkat kedua adalah rentang 90% sampai 100% yang dinilai “Kurang Efisien”. Tingkat ketiga adalah rentang 80% sampai 90% yang dinilai “Cukup”. Tingkat keempat adalah rentang 60% sampai 80% yang dinilai “Efisien”. Tingkat terakhir adalah dibawah 60% yang merupakan penilaian “Sangat Efisien” pada suatu satker. Jumlah

persentase tersebut adalah jumlah daya serap yang mampu suatu satker kelola sampai satu tahun anggaran berakhir. Adapun rincian tabelnya, sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Kriteria dalam Efisiensi**

<b>Presentasi Kinerja</b>	<b>Kriteria</b>
<b>Keuangan</b>	
100% ke atas	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup
60% - 80%	Efisien

Sumber: Depdagri, Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996.  
Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan

#### **2.1.4 Pengertian Belanja Negara**

Pengertian Belanja Negara berdasarkan Peraturan Pemerintah UU Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara adalah “Belanja negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.”

Dari penjelasan diatas mengenai Belanja Negara, penulis menyimpulkan bahwa suatu hal yang berkaitan dengan pengeluaran dan juga pembiayaan yang langsung mengurangi aset lancar pada pemerintah untuk kebutuhan suatu hal negara dan pemerintahan dinamakan suatu Belanja Negara.

#### **2.1.4.1 Komponen Belanja Negara**

Menurut Jurnal Penelitian dari Rusita Untari mengenai pengertian Belanja Negara, yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan SAP menyatakan bahwa belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/ Daerah. Definisi lain berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri no.59 Tahun 2007 dan adanya perubahan kedua dengan peraturan Menteri dalam Negeri N0.21 tahun 2011 tentang perubahan kedua, belanja dikelompokkan menjadi :

##### **1. Belanja Langsung**

Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan.

Belanja langsung terdiri atas Belanja :

- a. Belanja Pegawai
- b. Belanja barang dan jasa
- c. Belanja modal.

##### **2. Belanja Tidak Langsung**

Belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :

- a. Belanja pegawai
- b. Belanja bunga
- c. Belanja hibah
- d. Belanja subsidi
- e. Belanja bantuan sosial.
- f. Belanja bagi hasil kepada provinsi / kabupaten/kota dan pemerintah desa

#### **2.1.4.2 Komponen Belanja Langsung**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Tahun 2011 tentang perubahan kedua, belanja langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri atas dari belanja pegawai yang dimaksudkan dengan pengeluaran honorarium / upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah seperti belanja pegawai, belanja modal, belanja barang dan jasa .

1. Belanja pegawai merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk orang atau personal yang tidak berhubungan secara langsung dengan aktivitas atau dengan kata lain merupakan biaya tetap pegawai.
2. Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk penyediaan barang dan jasa yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan publik.

3. Belanja modal merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan dapat menambah asset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan .

### **2.1.5 Pengertian Laporan Realisasi Anggaran**

Pengertian Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan Peraturan Pemerintah SAP Nomor 24 tahun 2005 No 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran adalah

Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dengan anggarannya. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Kemudian dalam revisi Undang – Undang mengenai Keuangan Pemerintah, maka Laporan Realisasi Anggaran memiliki pengertian tambahan dalam UU. No 71 tahun 2010 yaitu

Standar Akuntansi Pemerintahan Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintahan pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan

Berdasarkan pengertian tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa Laporan Realisasi Anggaran adalah suatu tolak ukur untuk menilai sejauh mana kinerja suatu instansi dalam menggunakan anggaran dalam kurun waktu satu tahun anggaran berjalan.

#### **2.1.5.1 Tujuan Laporan Realisasi Anggaran**

Suatu Laporan Keuangan pada umumnya memiliki tujuan untuk apa dibuat pada suatu akuntansi perusahaan jasa, *retail*, maupun manufaktur dengan tujuan agar dapat dilaporkan pada pihak pemangku kepentingan pada suatu perusahaan. Begitupun pada suatu pemerintahan yang menggunakan pelaporan dengan tujuan yang hampir sama dengan perusahaan swasta lainnya, namun untuk tujuan Laporan Keuangan Pemerintah khususnya Laporan Realisasi Anggaran diatur oleh Undang-Undang Nomor 24 tahun 2005 tentang Laporan Realisasi Anggaran, yaitu sebagai berikut :

1. Tujuan standar Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan

realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2005 tentang Laporan Realisasi Anggaran yang didalam tujuan dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tersebut adalah mampu memberikan informasi kepada ruang lingkup LRA itu sendiri, seperti Pernyataan Standar ini diterapkan dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas. Pernyataan Standar ini berlaku untuk setiap entitas pelaporan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBN/APBD, tidak termasuk perusahaan negara/daerah. Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan berbasis akrual, tetap menyusun Laporan Realisasi Anggaran yang berbasis kas.

#### **2.1.5.2 Komponen dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**

Suatu laporan keuangan pada masing-masing instansi memiliki pos-pos atau yang disebut sebagai komponen yang mendukung dalam laporan keuangan, begitu pun sama halnya dengan Laporan Realisasi Anggaran yang telah diatur oleh Peraturan Pemerintah Undang-Undang No. 24 tahun 2005, bahwa

suatu Laporan Realisasi Keuangan memiliki beberapa komponen antara lain :

- a. Pendapatan
- b. Belanja
- c. Transfer
- d. Surplus atau defisit
- e. Penerimaan pembiayaan
- f. Pengeluaran pembiayaan
- g. Pembiayaan neto; dan
- h. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA)

#### **2.1.5.3 Kriteria Laporan Realisasi Anggaran (Kinerja Sektor Publik)**

Dalam Laporan Realisasi Anggaran terdapat suatu penilaian yang dapat dikatakan menjadi tolak ukur apakah instansi tersebut dapat dikatakan baik dalam kondisi kinerjanya. Menurut Deddi Nordiawan (2010 : 162), menjelaskan bahwa terdapat tiga indikator kinerja dari sektor publik, yaitu efisiensi terkait dengan input dan output dikatakan semakin efisien apabila rasio efisiensi cenderung di atas satu, efektivitas terkait dengan output dimana semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan maka semakin dikatakan efektif, dan ekonomi terkait dengan input dimana sumber daya *input* hendaknya diperoleh dengan harga lebih rendah (*spending less*). Indikator ekonomi sering kali digunakan sebagai

indikator satu-satunya walaupun pelaksanaan dalam organisasi sektor publik sering tidak puas.

Suatu kajian mengenai Laporan Realisasi Anggaran memiliki pengertian tambahan dan di dalamnya terdapat pengukuran mengenai Laporan Realisasi Anggaran dimana ukuran tersebut yaitu perbandingan antara anggaran dan realisasi sesuai dengan pengertian dalam UU. No 71 tahun 2010. Berikut.

Standar Akuntansi Pemerintahan Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintahan pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan

Sehingga berdasarkan kesimpulan di atas penulis mengambil garis besar mengenai kriteria kegunaan Laporan Realisasi Anggaran itu sendiri yaitu suatu ikhtisar atau penggambaran secara umum mengenai penggunaan anggaran secara efektif maupun efisien.

#### **2.1.5.4 Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Pusat**

Menurut PP No 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dalam menyusun suatu Laporan Realisasi Anggaran memiliki format penyusunan sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31**  
**DESEMBER 20X1 dan 20X0**

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
1	<b><u>PENDAPATAN</u></b>	xxx	xxx	xx	xxx
2	<b>PENDAPATAN PERPAJAKAN</b>	xxx	xxx	xx	xxx
3	Pendapatan Pajak Penghasilan	xxx	xxx	xx	xxx
4	Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	xxx	xxx	xx	xxx
5	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	xxx	xxx	xx	xxx
6	Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	xxx	xxx	xx	xxx
7	Pendapatan Cukai	xxx	xxx	xx	xxx
8	Pendapatan Bea Masuk	xxx	xxx	xx	xxx
9	Pendapatan Pajak Ekspor	xxx	xxx	xx	xxx
10	Pendapatan Pajak Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
11	Jumlah Pendapatan Perpajakan (3 s/d 10)	xxx	xxx	xx	xxx
12		xxx	xxx	xx	xxx
13	<b>PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>	xxx	xxx	xx	xxx
14	Pendapatan Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xx	xxx
15	Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	xxx	xxx	xx	xxx
16	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
17	Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak (14 s/d 16)	xxx	xxx	xx	xxx
18		xxx	xxx	xx	xxx
19	<b>PENDAPATAN HIBAH</b>	xxx	xxx	xx	xxx
20	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xx	xxx
21	Jumlah Pendapatan Hibah ( 20 s/d 20 )	xxx	xxx	xx	xxx
22	Jumlah PENDAPATAN ( 11 + 17 + 21 )	xxx	xxx	xx	xxx
23		xxx	xxx	xx	xxx

NO	URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
24	<b><u>BELANJA</u></b>	xxx	xxx	xx	xxx
25	<b>BELANJA OPERASI</b>	xxx	xxx	xx	xxx
26	Belanja Pegawai	xxx	xxx	xx	xxx
27	Belanja Barang	xxx	xxx	xx	xxx
28	Banga	xxx	xxx	xx	xxx
29	Subsidi	xxx	xxx	xx	xxx
30	Hibah	xxx	xxx	xx	xxx
31	Bantuan Sosial	xxx	xxx	xx	xxx
32	Belanja Lain-lain	xxx	xxx	xx	xxx
33	Jumlah Belanja Operasi ( 26 s/d 32 )	xxx	xxx	xx	xxx
34		xxx	xxx	xx	xxx
35	<b>BELANJA MODAL</b>	xxx	xxx	xx	xxx
36	Belanja Tanah	xxx	xxx	xx	xxx
37	Belanja Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xx	xxx
38	Belanja Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	xx	xxx
39	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx	xx	xxx
40	Belanja Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
41	Belanja Aset Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
42	Jumlah Belanja Modal ( 36 s/d 41 )	xxx	xxx	xx	xxx
43	<b>JUMLAH BELANJA ( 33 + 42 )</b>	xxx	xxx	xx	xxx
44		xxx	xxx	xx	xxx
45	<b><u>TRANSFER</u></b>	xxx	xxx	xx	xxx
46	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	xxx	xxx	xx	xxx
47	Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xx	xxx
48	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xx	xxx
49	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xx	xxx
50	Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx	xx	xxx
51	Jumlah Dana Perimbangan ( 47 s/d 50 )	xxx	xxx	xx	xxx
52		xxx	xxx	xx	xxx
53	<b>TRANSFER LAINNYA (d disesuaikan dengan program yang ada)</b>	xxx	xxx	xx	xxx
54	Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx	xx	xxx
55	Dana Penyesuaian	xxx	xxx	xx	xxx
56	Jumlah Transfer Lainnya ( 54 s/d 55 )	xxx	xxx	xx	xxx
57	<b>JUMLAH TRANSFER ( 51 + 56 )</b>	xxx	xxx	xx	xxx

NO	URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
58	<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER ( 43 - 57 )</b>	xxx	xxx	xx	xxx
59		xxx	xxx	xx	xxx
60	<b>SURPLUS/DEFISIT ( 22 - 58 )</b>	xxx	xxx	xx	xxx
61	<b><u>PEMBIAYAAN</u></b>	xxx	xxx	xx	xxx
62	<b>PENERIMAAN</b>	xxx	xxx	xx	xxx
63	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI</b>	xxx	xxx	xx	xxx
64	Penggunaan SILPA	xxx	xxx	xx	xxx
65	Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri Sektor Perbankan	xxx	xxx	xx	xxx
66	Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx	xx	xxx
67	Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
68	Penerimaan dari Divestasi	xxx	xxx	xx	xxx
69	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx	xx	xxx
70	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
71	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri ( 64 s/d 70 )	xxx	xxx	xx	xxx
72		xxx	xxx	xx	xxx
73	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN LUAR NEGERI</b>	xxx	xxx	xx	xxx
74	Penerimaan Pinjaman Luar Negeri	xxx	xxx	xx	xxx
75	Penerimaan Kembali Penerimaan Lembaga Internasional	xxx	xxx	xx	xxx
76	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri ( 74 s/d 76 )	xxx	xxx	xx	xxx
77	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN ( 71 + 76 )</b>	xxx	xxx	xx	xxx
78		xxx	xxx	xx	xxx
79	<b>PENGELUARAN</b>	xxx	xxx	xx	xxx
80	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI</b>	xxx	xxx	xx	xxx
81	Pembiayaan Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan	xxx	xxx	xx	xxx

NO	URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
82	Pembiayaan Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx	xx	xxx
83	Pembiayaan Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
84	Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah (PMP)	xxx	xxx	xx	xxx
85	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx	xx	xxx
86	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
87	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri ( 81 s/d 86 )	xxx	xxx	xx	xxx
88		xxx	xxx	xx	xxx
89	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN LUAR NEGERI</b>	xxx	xxx	xx	xxx
90	Pembiayaan Pokok Pinjaman Luar Negeri	xxx	xxx	xx	xxx
91	Pemberian Pinjaman kepada Lembaga Internasional	xxx	xxx	xx	xxx
92	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri ( 90 s/d 91 )	xxx	xxx	xx	xxx
93	<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN ( 87 + 92 )</b>	xxx	xxx	xx	xxx
94	<b>PEMBIAYAAN NETO ( 77 - 93 )</b>	xxx	xxx	xx	xxx
95	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran ( 60 + 94 )</b>	xxx	xxx	xx	xxx

### 2.1.6 Penelitian Terdahulu

Guna untuk memudahkan penelitian ini, penulis mengumpulkan beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dalam judul penelitian ini, “Pengaruh Efisiensi Belanja Negara terhadap Laporan Realisasi Anggaran periode 2014 – 2018 di PSTNT BATAN Bandung.” Dengan kesamaan dalam bidang akuntansi pemerintahan maka adapun penelitian-penelitian terdahulu yang penulis ambil antara lain sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Tinjauan Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil
1	Novelya Suoth ISSN 2303-1174 Tahun 2016	Pengukuran Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan Dan Aset (Dpkpa) Kabupaten Minahasa Selatan	Variabel Dependen Pendapatan dan Aset, Variabel Independen Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan	Tahun 2011 sampai dengan 2014 kinerja keuangan 100% efektivitas, dan tingkat efisiensinya dinyatakan kurang
2	Vera Sri Endah Cicilia ISSN 2622-6219 Tahun 2014	Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Serta Kemandirian Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Minahasa Utara	Variabel Efisiensi dan Efektivitas serta Kemandirian Pengelolaan	Pada tahun 2009 - 2013 memiliki rasio efektivitas senilai 90% dan rasio efisien senilai 70%

3	Naima Khoirul Arifa ISSN 2303-1174 Tahun 2017	Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran Dan Kesesuaian Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2015	Variabel Kinerja APBD dalam LRA dan Kesesuaian keuangan	Analisis Rasio Efektivitas untuk PAD dinilai sangat efektif
4	Cindy Kareima Waney ISSN 334-341 Tahun 2017	Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Di Dinas Pertanian Dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara	Variabel Efektivitas dan Efisiensi Kinerja	Analisis Rasio efektivitas menunjukkan angka 100% sedangkan rasio efisiensi menghasilkan nilai kurang
5	Dyah Setyaningrum ISSN 2549-3787 Tahun 2012	Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan	Variabel Dependen Tingkat Pengungkap Laporan Keuangan, Variabel Independen Karakteristik Pemerintah Daerah	Rata-rata nilai pengungkapan kinerja laporan keuangan sebesar 52,09%
6	Rusita Untari ISSN 2334 - 11074 Tahun 2015	Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pelaksanaan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Dinas Pendidikan Kota Semarang	Variabel Efisiensi dan Efektifitas	Pada tahun 2011 – 2014 sudah efisien, dan juga efektif dalam pelaksanaan anggaran
7	Melania Rampengan Sumber : Vol. 16 No. 03 Tahun 2016	Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Manado	Variabel efektifitas dan efisiensi	Tahun 2014 & 2015 cukup efektif, 2011 – 2013 kurang efektif, tahun 2011, 2012, 2013, 2015 kategori sangat efisien, dan 2014 kategori efisien

Sumber : Hasil Pengolahan Penulis, berdasarkan Review Beberapa Jurnal Terkait

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran merupakan alur atau diagram yang menunjukkan penelitian dalam korelasi antara variabel independen dan variabel dependen. Menurut Sekaran dan Bougie (2013:38), dalam Zulganef, bahwa Kerangka pemikiran adalah

“Sebuah model konseptual mengenai bagaimana seseorang berteori mengenai hubungan-hubungan antara beberapa faktor atau konsep untuk menjawab masalah penelitian”

Begitupun selaras dengan Pendapat Iskandar (2008:54) mengenai kerangka pemikiran yaitu :

kerangka pemikiran menjelaskan secara teoritis model konseptual variable-variabel penelitian, tentang bagaimana pertautan teori-teori yang berhubungan dengan variable-variabel penelitian yang ingin diteliti, yaitu variable bebas dengan variabel terikat.

Sehingga berdasarkan paparan tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa kerangka pemikiran adalah suatu gambaran mengenai apa yang akan diteliti dalam suatu penelitian. Berupa pengaruh apa yang akan terjadi dalam penelitian berupa korelasi antara variabel terikat dan variabel bebas.

### 2.2.1 Pengaruh Efisiensi Belanja Negara Terhadap Laporan Realisasi

#### Anggaran

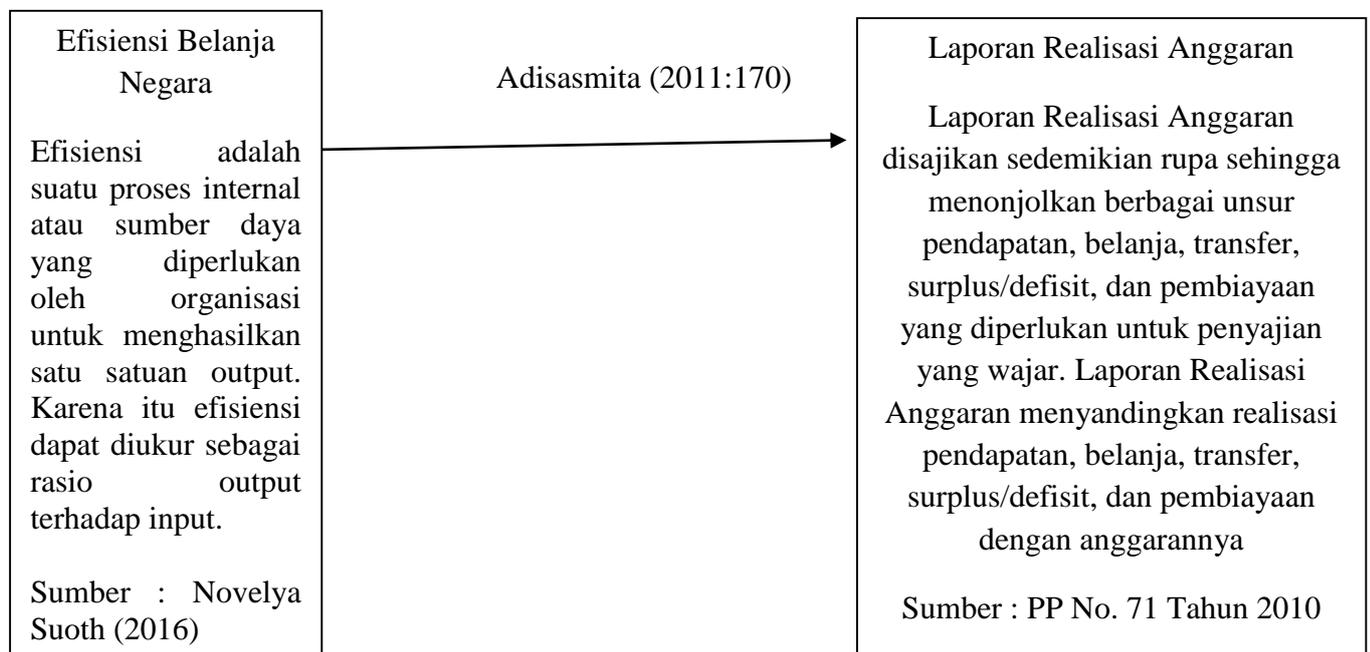
Dalam rangka mencapai Laporan Realisasi Anggaran yang wajar, suatu satuan kerja dalam instansi pemerintah diharuskan untuk dapat menciptakan Laporan Keuangan Pemerintahan yang baik sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Menurut (Sekaran : 2016), menyebutkan bahwa terdapat Pengaruh antara Efisiensi Belanja Negara dengan Laporan Realisasi Anggaran. Hal ini akan berpengaruh

untuk mengambil keputusan bagi para pejabat-pejabat (manajemen satuan kerja). Berikut beberapa penjelasan mengenai Pengaruh Efisiensi Belanja Negara terhadap Laporan Realisasi Anggaran.

Sedangkan dalam Jurnal Penelitian Novelya Suoth, mengutip indikator efisiensi dari Adisasmita (2011:170) mengatakan bahwa

“Efisiensi adalah suatu proses internal atau sumber daya yang diperlukan oleh organisasi untuk menghasilkan satu satuan output. Karena itu efisiensi dapat diukur sebagai rasio output terhadap input.”

Berdasarkan pendapat ahli tersebut, penulis mengambil kesimpulan penelitian dalam bentuk Kerangka Pemikiran sebagai berikut :



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

### 2.3 Hipotesis Penelitian

Suatu penelitian memiliki hipotesis penelitian untuk mendapatkan dugaan sementara dari hasil penelitian ini. Menurut (Zulganef, 2018:54) dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Bisnis dan Manajemen menjelaskan

Hipotesis Penelitian adalah kesimpulan atau jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang dibuat berdasarkan kerangka pemikiran, karena dibuat berdasarkan kerangka pemikiran, maka hipotesis sering juga dinamakan teori peneliti.

Berdasarkan penjelasan tersebut penulis mengambil garis besar hipotesis atas kerangka pemikiran di atas, yang mana dapat ditarik kesimpulan untuk hipotesis penelitian yaitu terdapat pengaruh antara Efisiensi Belanja Negara terhadap Laporan Realisasi Anggaran pada periode 2014-2018 di PSTNT BATAN Bandung.